



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAWAN KUSTAMAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 794952

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.092.461.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/40 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 337.096.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/96 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 150.638.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/372 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 498.204.000
4. Tanah Seluas 49 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 3.136.000
5. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 103.387.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 207.100.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA POLYGOM Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. LAINNYA, LIPAT SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
5. MOTOR, YAMAHA 1 YD FINOO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000



6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
19.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.524.464

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.353.285.964

III. HUTANG Rp. 626.353.643

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 726.932.321

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.